

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI DALAM INKLUSI POLITIK RAKYAT BERBASIS DIGITAL

Bendi Juantara¹

¹FISIP Universitas Lampung

Email: bendijuantara887@gmail.com

Abstract

Current global geopolitical, economic and digital hegemony has posed a serious threat to achieving national ideals and goals. In this context, there needs to be an attitude and action taken by a country to respond proactively and adaptively to develop strategic planning to maintain stability & sustainability in the future. Unfortunately, in facing this, internally Indonesia is still trapped by substantive challenges and obstacles. Starting from the leadership aspect, budget limitations, infrastructure, difficulties in collaboration between stakeholders, to the still low level of community awareness and participation. This research aims to examine opportunities for implementing democratic values in digital-based political inclusion of the people. The research method used is a descriptive approach with secondary data sources. Some of the findings from this research are that the idea of reforming the political sector (good political governance) is something important and a priority to be developed in the future. Implementation of people's political inclusion can be an antidote to the death of the flow of democratic development in representative political bodies. Digital media space can be used as an arena for implementing people's political inclusion. On the basis of an online platform, people can participate in discussions and share views, organize political movements, and voice demands to political leaders, as well as take part in public consultations.

Keywords: Democracy, People's Political Inclusion, Digital Media

Abstrak

Hegemoni geopolitik, ekonomi, dan digital global saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Dalam konteks ini, perlu ada sikap dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk merespon secara proaktif dan adaptif untuk mengembangkan perencanaan strategis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan di masa depan. Sayangnya, dalam menghadapi hal tersebut, secara internal Indonesia masih terjebak oleh tantangan dan hambatan substantif. Mulai dari aspek kepemimpinan, keterbatasan anggaran, infrastruktur, kesulitan kolaborasi antar pemangku kepentingan, hingga tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang penerapan nilai-nilai demokrasi dalam inklusi politik rakyat berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan sumber data sekunder. Beberapa temuan dari penelitian ini adalah bahwa gagasan reformasi sektor politik (good political governance) merupakan sesuatu yang penting dan menjadi prioritas untuk dikembangkan ke depannya. Implementasi inklusi politik rakyat dapat menjadi penangkal matinya arus pembangunan demokrasi di badan-badan politik perwakilan. Ruang media digital dapat dijadikan arena untuk mengimplementasikan inklusi politik masyarakat. Atas dasar platform online, orang dapat berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi pandangan, mengatur gerakan politik, dan menyuarakan tuntutan kepada para pemimpin politik, serta mengambil bagian dalam konsultasi publik.

Kata Kunci: Demokrasi, Inklusi Politik Rakyat, Media Digital

PENDAHULUAN

Hegemoni Geopolitik, ekonomi dan digital global saat ini telah menghadirkan ancaman serius dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam konteks tersebut perlu ada sikap dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk merespons secara proaktif dan adaptif menyusun perencanaan strategis guna menjaga stabilitas & keberlanjutan masa depan. Sayangnya dalam menghadapi hal tersebut, secara internal indonesia masih terjebak dengan tantangan dan kendala substantif. Mulai dari aspek kepemimpinan, Keterbatasan anggaran, infrastruktur, Kesulitan dalam kolaborasi antar stakeholder, hingga Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Esai ini akan membahas secara spesifik satu isu menarik berkaitan dengan persoalan **krisis kepemimpinan** ((Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R.2022; Wirajaya, A. Y: Syafrida, S., & Makhfudz, M. (2018). Santoso, L. 2013), dan **gerakan inklusi politik rakyat** (Hotman Siahaan, P. 2005; Dirkareshza, R., Wahid, U., Wijaya,S., Dirkareshza, N.P. & Permatasari, E.D. 2023; Hiariej, E 2018; Damanik, N. 2023; Amini, S. A., Mulia, J. R., & Trisoni, R. 2024). Sejak negara indonesia dideklarasikan kemerdekaannya oleh bung karno dan bung hatta, seluruh entitas bangsa indonesia sepakat bahwa negeri ini dibangun atas kehendak rakyat dengan tujuan agar rakyat dapat berdaulat atas segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tersebut maka nilai demokrasi jadi satu bagian penting yang tidak terpisahkan dalam konsensus dasar bangsa. Demokrasi akan menjadi arena bagi rakyat untuk mewujudkan cita-cita bersama (sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 dan ke-4, Bab 1 Pasal 1 UUD 1945).

Implementasi demokrasi di indonesia secara minimalis dan prosedural dapat dilihat dari adanya partisipasi politik rakyat yang disalurkan pada pemilihan umum (sebagaimana tertuang dalam Bab VIIb pasal 22 e UUD 1945). Suara rakyat ini diharapkan dapat menjadi legitimasi bagi pemimpin terpilih untuk dapat menjalankan mandat keterwakilan yang diberikan rakyat baik di legislatif maupun di eksekutif, dengan harapan kolaborasi antara “wakil rakyat dan rakyat” dapat mengimplementasikan demokrasi secara substantif (sebagaimana tertuang dalam Bab III pasal 4, Bab IV pasal 18, dan Bab VII pasal 19 UUD 1945). Namun demikian sistem pengisian kekuasaan melalui pemilu seringkali justru menghadirkan masalah baru, banyak para elit politik karbitan yang ikut kontestasi dalam pemilu mengedepankan cara berpikir pragmatis dan transaksional untuk mendapatkan dukungan secara instan. Apakah dengan membeli suara dengan uang (**Vote Buying**)

(Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., & Triantini, Z. E. 2017; Muhtadi, B. 2019; Tawakkal, G. T. I., Suhardono, W., Garner, A. D., & Seitz, T. 2017; Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. 2019; Putra, H. S. 2017). hingga bertukar dengan barang atau kebijakan tertentu (**Pork Barrel**). (Mahsun, M. 2016; Jati, W. R. 2013; Purwaningsih, T., & Widodo, B. E. C. 2020). Yang pasti terjadinya praktik *patronase klintelisme* telah meneguhkan posisi rakyat hanya sebagai *legacy* kekuasaan bagi para elit predator ini.

Minimnya garis representasi antara elit politik dan rakyat pada praktik pemilu memunculkan dampak “mandulnya” kinerja wakil rakyat dilembaga kekuasaan, terjebak korupsi dan *abuse of power*, hingga melanggengkan politik dinasti, sedangkan rakyat terombang ambing akibat polarisasi dan fragmentasi politik yang berakhir pada disintegrasi bangsa. Pada akhirnya kekuasaan yang dikelola melahirkan “Gap” atau ketimpangan sosial/ekonomi, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan sehingga tujuan utama negara jauh dari apa yang diharapkan.

Ide dalam mereformasi bidang politik (**good political governance**) menjadi sesuatu yang penting dan prioritas untuk dikembangkan kedepan. Hal tersebut karena dampak sistem politik sangat dominan mempengaruhi sistem lain seperti sistem ekonomi, hingga sistem sosial dalam kehidupan masyarakat. oleh karena itu Salah satu Kebijakan dalam menyikapi persoalan ini dapat di inisiasi dengan mempertimbangkan kekuatan inklusi politik rakyat. (sebagaimana tertuang dalam Bab X pasal 28 UUD 1945) Kekuatan ini diharapkan menjaga keseimbangan relasi antara rakyat dengan negara. Inklusi politik rakyat ini juga akan menjaga hak rakyat dapat diimplementasikan oleh negara dengan baik (sebagaimana tertuang dalam Bab X pasal 27, 28, 29,31,33 dan 34 UUD 1945)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan secara sekunder dengan diperoleh dari berita dan artikel jurnal publikasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang Telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan jenis analisis yang menjelaskan pembahasan secara mendalam tentang informasi yang telah tercantum pada sebuah literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inklusi politik adalah dasar sistem demokrasi karena melibatkan semua warga negara dalam proses politik untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Inklusi politik juga menciptakan stabilitas sosial dan meningkatkan legitimasi pemerintahan, yang sangat relevan di Indonesia, yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda.

Implementasi inklusi politik rakyat dapat dikemas dalam “aksi bersama” mewujudkan imajinasi tentang kesetaraan nilai dalam sebuah negara. (sebagaimana tertuang dalam variabel nilai 4 konsensus dasar kebangsaan). Dalam hal ini cara pandang rakyat terhadap negara bukan dilihat dari perbedaan agama, suku, budaya dll, tapi dilihat dari nilai toleransi, kebersamaan, moral, etika sehingga tumbuh kesadaran untuk bersama membangun tujuan bernegara dan peradaban. (Ghofir, J., & Umam, H. 2020; Maulidan, A. C., & Darmawan, W. 2024; Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. 2021; Hidayat, U. S. 2021). Nilai inklusi politik mengambil dari banyak sekali nilai kebaikan agama, norma dan falsafah yang hidup dari etnisitas. Terutama kaitannya dengan kesamaan derajat manusia/kesetaraan dan derajat warga negara. Inklusi politik perlu didorong pada setiap individu diri rakyat, lalu berkembang dalam lingkaran komunitas *civil society* yang terorganisir dengan baik. Kemudian direfleksikan tidak hanya pada tataran pemikiran dan tindakan yang sifatnya epistemik/ kognitif, simbolik, tapi juga pada ranah tindakan fisik dan politis/organisasional.

Inklusi Politik Rakyat Berbasis Digital

Ruang media digital saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap interaksi sosial dan politik rakyat. Berbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, mesin pencari seperti Google, dan berbagai platform sosial dan pasar online mengumpulkan data tentang identitas dan kebiasaan pengguna. Pengumpulan data dilakukan untuk memberikan apa yang diinginkan pengguna secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. (Iman, N. A. 2023).

Terlebih Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar di Indonesia, Aktivitas sosial yang diproduksi dari media sosial, telah memberikan pengaruh pada emosi, perasaan, dan ikatan sosial yang sama antar masyarakat digital. Rasionalitas dan

irrasionalitas masyarakat di uji untuk merespon/ menafsir isu-isu tertentu yang sengaja dikonstruksikan, dengan tujuan membangun emosi yang sama. sayangnya isu diruang publik tersebut tidaklah berakhir pada kata “pemecahan masalah”, tapi perdebatan argumentasi antar masyarakat dan berakhir pada ruang-ruang yang terbelah.

Dalam konteks ini maka ide memasukkan inklusi politik rakyat dalam ruang digital menjadi sangat penting. **Pertama**, transformasi sosial masyarakat perlu adaptasi dan penyesuaian. perubahan dari sisi teknologi digital harus dibarengi dengan kesiapan pengguna di ruang digital. Bagaimana mendorong pengguna sosial dapat menata diri, pemikiran, prilaku dan tindakan serta mengembangkan cara berpikir, nalar dan objektif. rakyat dapat menggunakan media sosial menjadi ruang pembangunan argumentasi yang rasional, tidak dilihat dari mana sumber argumen (dominasi mayoritas agama, etnisitas dll) tapi bobot argumen yang perlu di perbincangkan, diadvokasikan. **Kedua**, masyarakat harus dapat memandang ruang digital sebagai ruang untuk melatih emosi, tidak cepat terpancing pada hal-hal yang merusak rasa toleransi bersama, menghargai hak asasi orang lain, dan berpikir secara beradab, serta tidak ikut serta menjadi bagian memecah belah. Secanggih apapun teknologi digital, Faktor manusia sebagai kekuatan eksternal sangat menentukan wajah digital tersebut. dengan begitu maka membangkitkan kembali tentang nalar dan konsep “rasa” sebagai basis pergerakan untuk memangkas sifat-sifat apatisme rakyat untuk lebih membuka mata hati dan pikirannya dalam melihat persoalan kebangsaan. (Mahaswa, R. K., & Kim, M. S. 2023; Mahaswa, R. K. 2017).

Ketiga, Peran teknologi digital membuka peluang partisipasi politik yang lebih inklusif. Dengan basis platform online, masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi pandangan, mengorganisir gerakan politik, dan menyuarakan tuntutan kepada pemimpin politik, hingga ikut serta dalam konsultasi publik. Kekuatan digital ini memberikan kesempatan suara kepada individu masyarakat yang sebelumnya mungkin kurang terlibat aktif dalam politik, dan dengan demikian, meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, Di era digital, partisipasi politik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat secara langsung memberikan umpan balik kepada para pemimpin politik dan mengawasi tindakan mereka melalui media sosial, yang memberi masyarakat lebih banyak kontrol atas keputusan politik.

Disisi lain, upaya kolaboratif dari berbagai pihak juga penting dalam menghadapi tantangan partisipasi politik di era digital. Pemerintah, platform digital, dan rakyat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan partisipasi politik yang aman, sehat, dan konstruktif di dunia digital. Sementara negara mengawasi dan melindungi kepentingan rakyat, platform digital bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi pengguna. Di sisi lain, masyarakat mengawasi secara independen dan mendukung partisipasi politik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kehadiran media digital membuka ruang partisipasi politik masyarakat yang lebih terbuka dan efektif. masyarakat bisa turut serta terlibat dan berpartisipasi dalam proses gerakan, sosialisasi, protes sosial, input masukan dan partisipasi politik lainnya. Disisi lain media digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pemimpin politik, khususnya memperkuat kontrol publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan sinergi antar partisipasi dan media digital akan mendorong implementasi demokrasi semakin kuat. Disisi lain Kolaborasi antara negara, platform digital dan masyarakat berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan aman di dunia digital yang semakin terhubung. Dengan kolaborasi efektif di antara ketiga pihak ini, dapat tercapai partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan di era digital yang terus berkembang

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, S. A., Mulia, J. R., & Trisoni, R. (2024). Pendidikan Multikultural dan Inklusi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 130-142.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1-27.
- Damanik, N. (2023). Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Politik Lokal. *literacy notes*, 1(2).
- Dirkareshza, R., Wahid, U., Wijaya, S., Dirkareshza, N. P., & Permatasari, E. D. (2023). *Inklusi Politik untuk Semua: Menuju Pemilihan Umum yang Lebih Responsif terhadap Penyandang Disabilitas*. PT Idemedia Pustaka Utama.
- Ghofir, J., & Umam, H. (2020). Transformasi nilai pendidikan keberagamaan pada generasi milenial. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 14(1), 92-111.
- Hiariej, E. (Ed.). (2018). *Politik kewargaan di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Nusa Putra Press.
- Hotman Siahaan, P. (2005). Gerakan Sosial Politik Rakyat, Ontran-ontran Demokrasi.
- Iman, N. A. (2023). Dilema Algoritma: Dramaturgi di Media Sosial. *Dekonstruksi*, 9(02), 52-61.
- Jati, W. R. (2013). Fake Populism or Real Populism: Pork Barrel Policy as Political Corruption in House of Representative During 2009-2013. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Mahsun, M. (2016). Palembang, South Sumatra: aspiration funds and pork barrel politics. *Aspinall and Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia*, 120-137.
- Mahaswa, R. K., & Kim, M. S. (2023). Introducing the pluriverse of the Anthropocene: Toward an ontological politics of environmental governance in Indonesia. In *Environmental Governance in Indonesia* (pp. 15-31). Cham: Springer International Publishing.
- Mahaswa, R. K. (2017). The Democratization of Social Media a Critical Perspective in Technology.
- Maulidan, A. C., & Darmawan, W. (2024). Implikasi Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Persatuan Indonesia. *Jurnal Artefak*, 11(1), 49-64.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery* (p. 318). Springer Nature.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 47-72.
- Santoso, L. (2013). Dicari Sosok 'Negarawan' untuk Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 1-13.
- Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. (2021). *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Syafrida, S., & Makhfudz, M. (2018). Cari Pemimpin Dan Kepemimpinan Nasional Yang Tepat Bagi Masa Depan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(1), 095-118.
- Tawakkal, G. T. I., Suhardono, W., Garner, A. D., & Seitz, T. (2017). Consistency and vote buying: income, education, and attitudes about vote buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 17(3), 313-329.
- Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2019). Voting their conscience: Poverty, education, social pressure and vote buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 19(1), 19-38.
- Purwaningsih, T., & Widodo, B. E. C. (2020). The interplay of incumbency, political dynasty and corruption in Indonesia: Are political dynasties the cause of corruption in Indonesia? *Revista UNISCI*, (53).
- Putra, H. S. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 9(2), 205-218.
- Wirajaya, A. Y. Mengaktualisasikan Astha Brata Dalam Konteks Krisis Kepemimpinan. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* (Vol. 5, No. 1, pp. 36-45).